

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

TAHUN 2022



KECAMATAN LARANTUKA

TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan dan menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terwujud dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah wajib melaporkan capaian pelaksanaan tugas yang tercermin dalam program dan kegiatan setiap tahun kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah.

Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Camat.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kecamatan Larantuka melaksanakan 4 (empat) program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan dalam menjalankan seluruh kewenangan yang diberikan kepada camat baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan sumber daya aparatur, sarana prasarana dan pembiayaan yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Oleh karena itu menindaklanjuti Surat Bupati Flores Timur nomor: Pem. 130/198/Kjsm.OTDA/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penegasan, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Wilayah Kecamatan Larantuka ini dibuat.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, Nomor 48).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

- Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan Larantuka yang responsibel dan akuntabel

2. Tujuan:

- Sebagai media untuk mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Larantuka yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- Sebagai bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Bupati Flores Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Larantuka.
- Sebagai bahan penyusunan LPPD Bupati Flores Timur

BAB II
DESENTRALISASI URUSAN WAJIB

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan:

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan:

- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi Kegiatan:

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Kegiatan:

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan:
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

B. Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal

Untuk mengetahui keberhasilan/kinerja Kecamatan Larantuka yang termuat dalam DPA Kecamatan Larantuka Tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	Indikator kinerja	Target %	Tahun 2022			Pencapaian
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	8.793.414.899	8.012.353.479	91	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	29.929.500	29.589.000	99	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	100	55.650.000	44.850.000	80	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	41.364.850	41.257.500	100	
	JUMLAH (%)	100	8.920.359.249	8.128.049.979	91	

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, tergambar bahwa penyerapan anggaran hampir mencapai target atau hasil yang maksimal dan secara akumulasi tingkat penyerapan pada tahun anggaran 2022 mencapai 91 %.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kecamatan Larantuka) Urusan Wajib.

1. Luas wilayah Kecamatan Larantuka adalah 75,91 Km², dengan kepadatan penduduk kurang lebih 492 orang/Km²
2. Batas wilayah Kecamatan Larantuka:
 - Utara : Kecamatan Ile Mandiri
 - Selatan : Selat Larantuka
 - Timur : Selat Larantuka
 - Barat : Kecamatan Demon Pagong
3. Iklim dan Curah Hujan:

Letak geografis Kecamatan Larantuka berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah di wilayah, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera

Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober November.

Konsekuensinya Larantuka menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 (empat) bulan (Desember, Januari, Februari, dan Maret) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

Curah hujan di Kecamatan larantuka bertipe hujan konvektif yaitu mempunyai pola siklus musiman dan harian yang tidak nyata dan daerah cakupan tidak luas (20-50 km), lama hujan singkat 30-90 menit dan sering berupa badai disertai angin kencang pada bulan-bulan tertentu.

4. Topografi :

- a. Tanah perbukitan : 55.98 %.
- b. Tanah lembah : 37,69 %.
- c. Luas tanah hutan : 6,33 ha.

5. Wilayah Administrasi Pemerintahan. :

Kecamatan Larantuka terdiri dari 18 Kelurahan dan 2 Desa dengan luas wilayah : 75,91 dapat di lihat pada tabel berikut ini;

Nama Desa dan Luas Wilayah

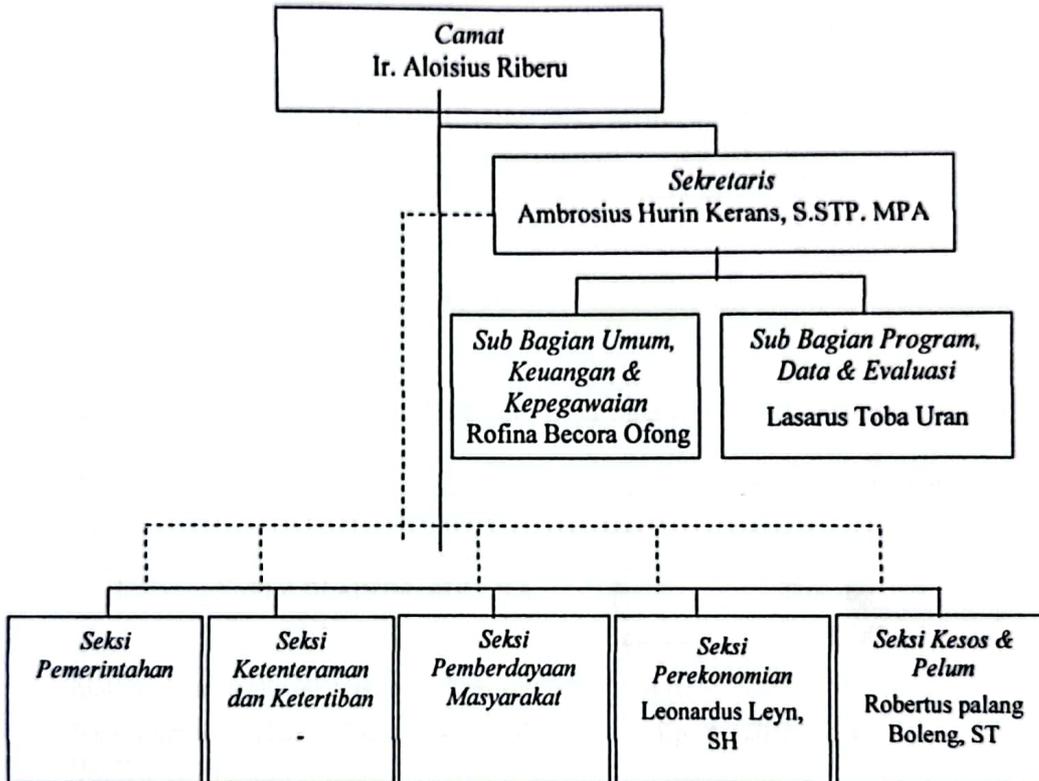
NO	NAMA DESA	LUAS DESA (Km ²)	Ket
1.	Weri	1.05	
2.	Sarotari Timur	2.14	
3.	Sarotari tengah	1.39	
4.	Sarotari	2.17	
5.	Puken Tobi Wangibao	5.83	
6.	Waihali	1,84	
7.	Pohon bao	2.45	
8.	Ekasapta	0.84	
9.	Amagarapati	2,82	
10.	Postoh	1,68	
11.	Lokea	2.82	
12.	Lohayong	1.40	
13.	Pohon sirih	1.68	
14.	Balela	5,62	
15.	Larantuka	4,50	
16.	Pantai besar	1.68	
17.	Lewolere	7.88	
18.	Waibalun	11.25	
19.	Lamawalang	4.50	
20.	Mokantarak	12.37	
	Jumlah	75,91	

D. Organisasi Kecamatan dan Sumber Daya Aparatur.

(Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, tata kelola pemerintahan Kecamatan Larantuka dipimpin oleh camat dan dibantu Sekretaris Camat, 4 orang kepala seksi, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 8 staf pelaksana fungsional umum. Adapun struktur organisasi Kantor Camat larantuka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR PEMERINTAH KECAMATAN LARANTUKA



Sumber Daya Aparatur dalam Jabatan Struktural SKPD Kecamatan Larantuka dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Jumlah PNS Kantor Kecamatan Larantuka Tahun 2022 berdasarkan Jabatan:

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	2 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			6 orang

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2022 menurut Pangkat Golongan/Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV.b	1 orang
2.	Penata Tingkat I	III.d	3 orang
3.	Penata	III.c	2 orang
4.	Penata Muda Tingkat I	III.b	- orang
5.	Penata Muda	III.a	3 orang
6.	Pengatur Tingkat I	II.d	3 orang
7.	Pengatur	II.c	1 orang
8.	Pengatur Muda	II.a	1 orang
Jumlah			14 orang

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2022 menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	3 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	-
4.	SLTA	10 orang
JUMLAH		16 Orang

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2022 menurut Diklat Penjurangan:

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	PIM IV ADUM/ADUMLA	5 orang
JUMLAH		5 orang

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Total anggaran Kantor Camat Larantuka sebesar Rp. 8.920.359.249.- terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung (belanja gaji)
Belanja tidak langsung sebesar 8.504.519.902- realisasi anggaran sebesar Rp. 7.730.828.117 atau 100 %
2. Belanja langsung
Belanja langsung sebesar Rp. 415.839.347- realisasi anggaran sebesar: Rp. 397.221.882 atau 97 %

Dapat dirinci berdasarkan program/kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

> Input Dana

Target : Rp. 49.191.000.-

Realisasi : Rp. 48.626.000.-

Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan, LPPD, Renja, Renstra.

Outcomes : Terevaluasinya kinerja OPD

b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

➤ Input Dana

Target : Rp. 24.665.000.-

Realisasi : Rp. 24.665.000.-

Output : Tersedianya jasa administrasi

Outcomes : Terlaksananya pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan

c. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 2.997.962.-

Realisasi : Rp. 2.995.962.-

Output : Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan

Outcomes : Terpenuhinya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 22.877.500.-

Realisasi : Rp. 22.624.400.-

Output : Jumlah alat kebersihan kantor dan alat tulis kantor yang disediakan

Outcomes : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

➤ Input Dana

Target : Rp. 10.000.000.-

Realisasi : Rp. 10.000.000.-

Output : Jumlah barang cetakan dan foto copy yang disediakan

Outcomes : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

➤ Input Dana

Target : Rp. 1.050.000.-

Realisasi : Rp. 75.000.-

Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan

Outcomes : Meningkatkan perkembangan informasi

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

➤ Input Dana

Target : Rp. 15.000.000.-

Realisasi : Rp. 14.825.000.-

Output : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Outcomes : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➤ Input Dana

Target : Rp. 53.685.000.-

Realisasi : Rp. 53.669.000.-

Output : Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi

Outcomes : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan cepat

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

➤ Input Dana

Target : Rp. 1.000.000.-

Realisasi : Rp. 760.000.-

Output : Jumlah meterai yang disiapkan

Outcomes : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

➤ Input Dana

Target : Rp. 21.880.000.-

Realisasi : Rp. 20.474.000.-

Output : Jumlah jasa rekening telepon, air dan listrik yang disediakan

Outcomes: Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 57.600.000.-

Realisasi : Rp. 57.600.000.-

Output : Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan

Outcomes : Terpenuhinya tenaga teknis pendukung perkantoran

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

➤ Input dana

Target : Rp 22.948.535.-

Realisasi : Rp. 20.612.000.-

Output : Jumlah kendaraan dinas operasional yang difasilitasi perizinan dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara

- Outcomes : Meningkatnya operasional kendaraan dinas untuk pelayanan administrasi perkantoran
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Input dana
 - Target : Rp 3.000.000.-
 - Realisasi : Rp. 2.500.000.-
 - Output : Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara
 - Outcomes : Terpeliharanya sarana gedung kantor
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Input dana
 - Target : Rp 3.000.000.-
 - Realisasi : Rp. 2.100.000.-
 - Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
 - Outcomes : Meningkatnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANAN PUBLIK

- a. *Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Input dana
 - Target : Rp 29.929.500.-
 - Realisasi : Rp. 29.589.000.-
 - Output : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
 - Outcomes : Meningkatnya administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatnya derajat kesehatan balita, dan ibu melahirkan

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. *Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan:*

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - Input dana
 - Target : Rp 55.650.000.-
 - Realisasi : Rp. 44.850.000.-
 - Output : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
 - Outcomes : Meningkatkan kerja sama lintas sektor

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan:

- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Input dana
 - Target : Rp 16.364.850.-
 - Realisasi : Rp. 16.257.500.-
 - Output : Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa
 - Outcomes : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam menyusun APBDes dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
- Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Input dana
 - Target : Rp 25.000.000.-
 - Realisasi : Rp. 25.000.000.-
 - Output : Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan
 - Outcomes : Dihasilkannya perencanaan pembangunan desa/kelurahan

F. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dilaksanakan mulai dari tingkat Dusun/lingkungan, kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Proses perencanaan di tingkat Dusun/lingkungan Kelurahan lebih bersifat penggalian gagasan, hal ini lebih bersifat mengumpulkan data/informasi dan menampung berbagai usulan masyarakat pada masing-masing dusun/lingkungan untuk diteruskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan/desa. Musrenbangdes dan musrenbangkel adalah musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan/desa untuk menghasilkan usulan-usulan prioritas Kelurahan dan Desa sesuai dengan kebutuhan yang bersifat prioritas di kelurahan/desa, dan sebagai sumber untuk menghasilkan usulan prioritas sebagaimana yang termuat dalam Dokumen RPJMDes sebagai hasil kesepakatan antara lurah/Kepala Desa dan BPD. Dalam RPJMDes, kelurahan dan desa diharuskan untuk menyusun RKPDes tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDES.

Hasil Musrenbangkel/Musrenbangdes wajib menghasilkan usulan-usulan dengan sumber pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembiayaan oleh desa melalui APBDes dengan sumber dana dari Dana Desa, BHP (Bagi Hasil Pajak) dan PAD Desa.
- b. Pembiayaan oleh pemerintah daerah lewat APBD dan APBN terdiri dari:

- DAU Tambahan

DAU Tambahan adalah sejumlah plafon anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program kegiatan Sarana Pra Sarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan melalui musyawarah kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah.

DAU Tambahan Tahun 2022 dialokasikan untuk mendanai kegiatan peningkatan sarana dan prasarana jalan/jembatan antar desa/Kelurahan, talud/parit pengaman pantai/pemukiman, sarana prasarana pendidikan dan sarana prasarana kesehatan dan penanganan dan Stunting.

- APBD

Usulan-usulan yang tidak dapat didanai dengan APBDES dan Pagu Indikatif Kecamatan akan diusulkan ke tingkat kabupaten lewat Musrenbang RKPD Kabupaten Flores Timur di Kecamatan Larantuka dan Musrenbang Kabupaten Flores Timur.

- APBN

Anggaran yang dialokasikan dari APBN khusus untuk mendanai program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik di 18 Kelurahan

G. Kondisi Sarana-Prasarana Kantor.

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Larantuka dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Kondisi Aset Kantor Camat Larantuka Tahun 2021

No	Asset/Modal	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	1 Bidang	√	-	-	
2	Gedung Kantor	1 Unit	√	-	-	
3	Rumah dinas Camat	-	-	-	-	
4	Ruang rapat	1 Unit	√	-	-	
5	Prasarana dan Sarana Penunjang					
	1. Sedan	1 buah	√	-	-	
	2. Sepeda Motor	5 Buah	√	-	-	
	3. Lemari arsip kayu	3 buah	√	-	-	
	4. Filing besi/metal	2 buah	√	-	-	
	5. Lemari kayu:					
	- 2 pintu		4	-	1	
	- 3 pintu	1 buah	-	-	1	
	6. Overhead proyektor	1 buah	√	-	-	
	7. Meja kayu ½ biro	21 buah	10	-	11	
	Meja Biro	8 buah	√			
	9. Meja rapat	10 buah	√	-	-	
	10. Meja pelayanan+ Bangku alumunium	1 set	√	-	-	
	11. Kursi rapat plastik (Napoly)	110 buah	√	-	-	
	12. Kursi rapat spon	9 buah	-	-	9	
	13. Kursi tamu panjang (kayu)	2 buah	√	-	-	
	14. Kursi putar spon	2 buah	1	-	1	
	15. Sofa	2 unit	1	-	1	
	16. Meubeleur lain (kain meja rapat)	9 buah	√	-		
	17. Kursi Kerja	17 buah	11	-	6	

18.	Gorden	4 paket	2	-	2	
19.	Komputer PC	5 unit	2	-	3	
20.	Komputer Master (Server) + UPS	1 unit	√			
21.	Laptop	6 unit	2	-	4	
23.	Printer	5 buah	√	-	-	
25.	Pesawat Telephone	3 bh	2	-	1	
26.	- Peralatan Sound system	1 Unit	√	-	-	-
	- Wireless	1 buah	1	-	-	
32.	- Kipas angin	5 Buah	√	-	-	
	- AC blower berdiri	2 buah	√	-	-	
	- AC unit panasonic	2 buah	√	-	-	

H. Permasalahan dan Solusi.

Masalah yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Kurang memadainya SDM aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Keterbatasan alokasi anggaran dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Masih kurangnya tenaga fungsional dalam membantu pelaksanaan tugas dan belum terisinya 3 (tiga) jabatan struktural yakni Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi PMD dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
4. Keamanan gedung kantor yang kurang terjaga karena tidak ada sarana pendukung berupa pagar.

Solusi/Jalan Keluar.

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan. Pelatihan serta supervisi dan pembinaan.
2. Meningkatkan jumlah alokasi anggaran pada Kecamatan Larantuka guna mendukung efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlu adanya penambahan tenaga fungsional di Kantor Camat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pengisian jabatan 3 (tiga) Kepala Seksi yang lowong.
4. Perlu dibangun pagar guna melindungi gedung beserta aset/dokumen yang ada didalamnya.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg/Sub Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Kantor Camat Larantuka	Fungsi Penunjang Prioritas		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		8.793.414.899		8.012.353.479			
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dok	49.191.000	7 dok	48.626.000	-	-	-
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 bln	8.504.519.902	14 Bln	7.730.828.117	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	24.665.000	4 orang	24.665.000	-	-	-
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 komp	2.997.962	10 komp	2.995.962	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 jenis, 50 jenis	22.877.500	-12 bln, 12 jenis	22.624.400	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.500 lbr 25 buku	10.000.000	37.500 lbr 25 buku	10.000.000	-	-	-
				Fasilitas Kunjungan Tamu	300 dos	15.000.000	296 dos	14.825.000	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 bln	1.050.000	11 bln	75.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	53.685.000	100 kali	53.669.000	-	-	-
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lbr	1.000.000	76 lbr	760.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	21.880.000	12 bulan	20.473.000	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 orang	57.600.000	6 orang	57.600.000	-	-	-

2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		29.929.500		29.589.000			
				<i>Pemeliharaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>							
				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	7 unit	22.948.535	6 unit	20.612.000	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	3.000.000	1 unit	2.500.000	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 unit	3.000.000	6 unit	2.100.000	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 kali	29.929.500	40 kali	29.589.000	-	-	-
3				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		56.650.000		44.850.000			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daaerah							
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 kali	55.650.000	12 bulan	44.850.000	-	-	-
4				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		41.364.850		41.257.500			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 desa	16.364.850	2 desa	16.257.500	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	2 kali	25.000.000	20 Desa/kel	25.000.000			

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total target keuangan Kantor Camat Larantuka pada Tahun Anggaran 2022 untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 8.921.359.249,-. Untuk membiayai 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar Rp. 8.793.414.899 dengan realisasinya sebesar Rp. 8.012.353.479,- Untuk membiayai 5 (lima) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan.
 2. Target Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 29.929.500,- dengan realisasinya sebesar Rp. 29.589.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
 3. Target Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 55.650.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 44.850.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
 4. Target Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 41.364.850,- dengan realisasinya sebesar Rp. 41.257.500,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
- Total anggaran Kecamatan Larantuka sebesar Rp. 8.920.359.249 dengan realisasi sebesar Rp. 8.128.049.979 (91 %)**

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Dalam upaya meningkatkan percepatan pelayanan pemerintahan di Kecamatan Larantuka langkah-langkah yang dilakukan antara lain melalui koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam mendukung berbagai program/kegiatan yang bermuara ke desa dari pemerintah, pemerintah propinsi maupun dari sektor-lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Koordinasi sebagaimana dimaksud adalah :

1. Forum Koordinasi.

1.1 Forkompincam

a Materi Koordinasi.

Masalah-masalah aktual yang berada di wilayah kecamatan Larantuka yang meliputi:

- Persoalan Kamtibmas
- Masalah sengketa tanah baik antar individu maupun antar individu dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- Masalah Kesehatan Masyarakat:
 - Stunting

b. Instansi Vertikal Yang Terlibat.

- Kepolisian Republik Indonesia
- TNI

c Sumber dana.

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan koordinasi ini bersumber pada APBD Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Larantuka Tahun Anggaran 2022.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi.

Pelaksanaan Forkompincam berpedoman pada pengaturan forum koordinasi tingkat Kabupaten melalui sekretariat pada pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Hal ini didasarkan karena kecamatan sebagai lembaga/institusi yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

b. Kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan adanya biaya rapat koordinasi yang bersumber dari APBD telah dilakukan:

- rapat koordinasi bulanan bersama Forkompincam yang membahas persoalan Kamtibmas yang terjadi di Kecamatan Larantuka.

c. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Membangun pemahaman yang sama atas berbagai persoalan keamanan dan ketertiban yang dihadapi masyarakat di wilayah Kecamatan Larantuka dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

B. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.

Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan para Kepala Desa dan Lurah terkait persehatian kesepakatan batas, penetapan dan penegasan batas wilayah administratif desa dan kelurahan.

C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Melakukan kooordinasi dengan SKPD terkait dan bersama para Lurah dan Kepala Desa melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap potensi-potensi bencana yang

muncul baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang ada di wilayah Kecamatan Larantuka serta melakukan upaya mitigasi dan pencegahannya.

D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Selalu melakukan koordinasi, komunikasi dan mengambil langkah cepat dan terukur terhadap potensi masalah ketentraman dan Ketertiban umum bersama para Lurah dan Kepala desa, Komando Rayon Militer 1624-01 Larantuka serta para Babinkantibmas se-Kecamatan Larantuka.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Larantuka ini dibuat untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan selama tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang kami miliki baik berupa sumber daya aparatur, pembiayaan dan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang menjadi tuntutan baik pemerintah supra kecamatan maupun warga masyarakat Kecamatan Larantuka

Larantuka, Januari 2023.

Camat Larantuka,

Ir. ALOISIUS RIBERU
Pembina Tingkat I
NIP. 19670420 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
ATAS LPJ NOMOR : 022/SPJ/GU/274/2022

Urusan Pemerintahan : 7-01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.3.0 Kantor Camat Larantuka
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.3.0.0 Kantor Camat Larantuka
Pengguna Anggaran : Ir. Aloisius Riberu
Bendahara Pengeluaran : Yohanes Djonson Riberu

KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	680.000	620.000	0	0	620.000	60.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.640.000	1.640.000	0	0	1.640.000	0
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	0
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.140.000	3.875.000	0	0	3.875.000	265.000
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	0
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	32.311.000	22.100.000	0	10.211.000	32.311.000	0
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.520.000	4.280.000	0	0	4.280.000	240.000



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.725.534.540	5.255.862.900	0	0	5.255.862.900	469.671.640
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	474.354.020	461.778.062	0	0	461.778.062	12.575.958
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	515.254.600	475.340.000	0	0	475.340.000	39.914.600
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	125.830.320	119.510.000	0	0	119.510.000	6.320.320
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	302.567.160	288.014.340	0	0	288.014.340	14.552.820
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.689.420	1.590.319	0	0	1.590.319	16.099.101
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	170.940	76.248	0	0	76.248	94.692
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	580.046.542	316.813.872	107.647.006	0	424.460.878	155.585.664
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	30.793.044	0	24.904.566	0	24.904.566	5.888.478
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	732.279.316	517.820.457	161.470.347	0	679.290.804	52.988.512
1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.600.000	20.500.000	0	4.100.000	24.600.000	0
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	65.000	0	0	65.000	65.000	0
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.997.962	623.000	0	2.372.962	2.995.962	2.000
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.886.000	1.380.000	0	500.000	1.880.000	6.000
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13.521.500	11.088.400	0	2.400.000	13.488.400	33.100

KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.185.000	3.560.000	0	2.580.000	6.140.000	45.000
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.285.000	1.005.500	0	110.500	1.116.000	169.000
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0	0	0	0	0	0
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000.000	5.313.000	0	4.687.000	10.000.000	0
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.050.000	75.000	0	0	75.000	975.000
1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	13.825.000	0	1.200.000	14.825.000	175.000
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.685.000	47.239.000	0	6.430.000	53.889.000	16.000
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000	760.000	0	0	760.000	240.000
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	15.200.000	10.501.000	0	3.730.000	14.231.000	969.000
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.300.000	1.353.500	0	1.853.500	3.207.000	93.000
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.380.000	2.525.000	0	510.000	3.035.000	345.000
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.600.000	57.600.000	0	0	57.600.000	0



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.848.535	14.405.000	0	1.988.000	16.391.000	457.535
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000	0	0	708.000	708.000	1.694.000
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.700.000	3.515.000	0	0	3.515.000	185.000
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000	500.000
1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000	0
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	900.000	0	0	900.000	900.000	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	494.500	466.000	0	0	466.000	28.500



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	90.000	0	0	0	0	90.000
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	345.000	344.000	0	0	344.000	1.000
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	22.400.000	22.399.000	0	0	22.399.000	1.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.600.000	6.380.000	0	0	6.380.000	220.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	55.650.000	41.300.000	0	3.550.000	44.850.000	10.800.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.124.850	2.084.500	0	0	2.084.500	40.350
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.150.000	5.150.000	0	0	5.150.000	0
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	8.000.000	7.998.000	0	0	7.998.000	2.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.090.000	1.025.000	0	0	1.025.000	65.000



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
6.2.01.9	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa						
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	0
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.300.000	8.300.000	0	0	8.300.000	0
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	4.160.000	4.160.000	0	0	4.160.000	0
5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	540.000	540.000	0	0	540.000	0
	TOTAL	8.920.359.249	7.784.936.098	294.021.919	49.991.952	8.123.349.973	791.409.270

Larantuka, 28 Desember 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

Yohanes Djonson Riberu
NIP19701222 199203 1 005

